



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI II DPR RI
MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2023-2024
KE KABUPATEN KARAWANG, PROVINSI JAWA BARAT**

KAMIS, 14 SEPTEMBER 2023

I. PENDAHULUAN

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Komisi II DPR RI dapat melakukan kunjungan kerja ke daerah sesuai dengan amanat Pasal 98 ayat (4) huruf f UU MD3. Untuk itulah, pada masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024, Komisi II DPR RI kembali melaksanakan kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, dalam rangka pengawasan atas persiapan pelaksanaan tahapan pemilu 2024.

Kunjungan kerja spesifik ini ingin mengetahui bagaimana kesiapan pelaksanaan Pemilu 2024 yang telah dilakukan oleh penyelenggara pemilu, baik KPU Kabupaten Karang maupun Bawaslu Kabupaten Semarang, terkait agenda tahapan pemilu yang sudah, sedang dan akan berlangsung. Termasuk pula bagaimana koordinasi dan sinergi yang dilakukan KPU dan Bawaslu dengan Pemerintah Kabupaten Karawang untuk menyukseskan pesta demokrasi pada 2024 mendatang tersebut.

Hingga kini, tahapan pemilu yang telah selesai dilaksanakan yaitu pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu serta penetapan peserta pemilu 2024, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan pembentukan Badan Adhoc, pemutakhiran Data Pemilih, dan pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih dan pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) bakal calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan Perseorangan Anggota DPD. Sekarang ini sedang berlangsung tahapan pengajuan calon pengganti sementara bakal calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten setelah masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS tersebut.

Tim Kunjungan Reses Komisi II DPR RI ke Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat berjumlah 9 (sembilan) orang anggota yang dipimpin oleh **Yth. Bpk. Saan Mustopa, M.Si.**, dari Fraksi Partai NasDem beserta anggota Tim terdiri dari:

NO	NO - A	NAMA	KETERANGAN
1.	A-367	Saan Mustopa, M.Si.	Ketua Tim/ Wakil Ketua Komisi II/F-P Nasdem
2.	A-183	Ryanta	Anggota/ F-PDIP
3.	A-186	Paryono	Anggota/ F-PDIP
4.	A-321	Dra. Hj. Haeny Relawati R. W., M.Si.	Anggota/ F-P Golkar
5.	A-100	Prasetyo Hadi	Anggota/F-P Gerindra
6.	A-126	Drs. Difriadi	Anggota/F-P Gerindra
7.	A-056	H. Haruna, M.A., M.B.A.	Anggota/ F-PKB
8.	A-528	Rezka Oktoberia	Anggota/ F-PD
9.	A-422	Dr. H. Mardani Ali Sera, M.Eng	Anggota/ F-PKS
SEKRETARIAT			
10.	-----	Eny Sulistiowati, S.Kom	Kasubag Rapat Setkom II
11.	-----	Muhdar Yusa, S.Sos	Sekretariat Komisi II
12.	-----	Syaiful Hadi	Sekretariat Komisi II
13.	-----	Gumilang Wiby Laksono	Sekretariat Komisi II
14.	-----	Satya Alvino Pindandito, M.A.	Tenaga Ahli Komisi II
15.	-----	Salman Nasution	Tenaga Ahli Komisi II
16.	-----	Taufan Syahrulli	Medsos

16.	-----	Marjoko	Driver
-----	-------	---------	--------

Tim Kunjungan Spesifik Komisi II DPR RI ini juga didampingi oleh Sekretariat Komisi II DPR RI, Tenaga Ahli Komisi II DPR RI, dan Media Sosial DPR RI, serta utusan mitra kerja Komisi II DPR RI.

II. WAKTU DAN TEMPAT KUNJUNGAN KERJA

Kunjungan Kerja ini dilaksanakan pada tanggal 14 September 2023 di Kantor KPU Kabupaten Karawang, dengan menghadirkan Sub Koordinator Identitas Penduduk Disdukcatpil Kabupaten Karawang Abdul Majid, Kasubdit Evaluasi Perkembangan Desa Wilayah III Kementerian Dalam Negeri Dr. , Drs. Wawan Munawar Kholid, M.Si, Ketua Bawaslu Jawa Barat Zacky M Zam Zam beserta jajaran, KPU Jawa Barat beserta jajaran, Deputi Bidang Dukungan Teknis Sekretariat Jenderal KPU RI Eberta Kawima, Kepala Biro Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Proses Bawaslu, Harimurti Wicaksono, Ketua KPU Kabupaten Karawang Ikhsan Indra Putra beserta jajaran dan Ketua Bawaslu Kabupaten Karawang Engkus Kusnadi beserta jajaran.

III. HASIL KUNJUNGAN KERJA

A. Sambutan Pimpinan Rombongan Bapak Bpk. Saan Mustopa, M.Si.,

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas perkenan-Nya kita dapat menghadiri pertemuan hari ini. Dalam kesempatan yang baik ini, atas nama Komisi II DPR RI izinkanlah saya menyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya atas sambutan yang hangat dari jajaran KPU Kabupaten Karawang, Bawaslu Kabupaten Karawang, Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dan para mitra terkait lainnya dalam kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat ini, mulai dari koordinasi, penyambutan, sampai dengan terselenggaranya pertemuan ini. Semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa sehingga dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dalam mengemban tugas negara.

Perlu kami sampaikan bahwa pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023 -2024, Komisi II DPR RI melakukan kunker ke 2 (dua) Provinsi, yaitu Jawa Barat dan

Sumatera Utara. Maksud dan tujuan Komisi II DPR RI melakukan pengawasan dan evaluasi menyeluruh persiapan pelaksanaan tahapan pemilu 2024 diantaranya jumlah anggaran yang diterima oleh KPU Kabupaten Karawang pada tahun 2022 dan tahun 2023, koordinasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Karawang dengan Pemerintah Kabupaten Karawang terkait pelaksanaan tahapan Pemilu 2024, jumlah data pemilih tetap di Kabupaten Karawang, laporan terkait tahapan pencalonan anggota legislatif dan perseorangan, penggunaan aplikasi sistem informasi pemilu, dan persiapan tahapan pilpres dan pilkada pada 2024 mendatang.

Komisi II DPR RI juga telah menyampaikan pertanyaan secara tertulis, dan kami harapkan akan memperoleh penjelasan yang lebih detail dan tajam secara tertulis dengan materi pertanyaan yang telah kami sampaikan tersebut. Semua jawaban ataupun masukan yang disampaikan kepada Komisi II DPR RI, akan menjadi bahan diskusi di internal Komisi II DPR RI, dan selanjutnya akan dijadikan sebagai bahan untuk ditindaklanjuti dalam raker/RDP dengan kementerian/lembaga terkait.

B. Pemaparan Ketua KPU Kabupaten Karawang Ikhsan Indra Putra

Ketua KPU Kabupaten Karawang Ikhsan Indra Putra menyampaikan sejumlah poin-poin berikut ini:

1. Data Pemilih Kabupaten Karawang

- Jumlah DP4 yang diterima KPU Kabupaten Karawang sebanyak 1.820.903 dengan rincian laki-laki sebanyak 912.827 dan perempuan sebanyak 908.076, data sebagaimana dimaksud yang dipergunakan sebagai dasar penyusunan daftar pemilih untuk Pemilu 2024, sedangkan jumlah pemilih tetap pada Pemilu 2019 sebanyak 1.669.959 dengan rincian laki-laki sebanyak 838.075 dan perempuan sebanyak 831.884 terjadi kenaikan jumlah pemilih antara DPT Pemilu 2019 dengan DP4 Pemilu 2024 sebanyak 150.944 atau terjadi penambahan jumlah pemilih sebanyak 9,3%
- Jumlah DPS KPU Kabupaten Karawang sebanyak 1.789.178 dengan rincian laki-laki sebanyak 898.941 dan perempuan sebanyak 890.237.

- Jumlah DPSHP KPU Kabupaten Karawang sebanyak 1.780.692 dengan rincian laki-laki sebanyak 894.673 dan perempuan sebanyak 886.019.
- Jumlah DPT Kabupaten Karawang sebanyak 1.779.207 dengan rincian laki-laki 893.869 dan perempuan sebanyak 885.338, jumlah perbandingan DPT Pemilu 2019 sebanyak 1.669.959 dengan rincian laki-laki sebanyak 838.075 dan perempuan sebanyak 831.884 terjadi kenaikan jumlah pemilih antara DPT Pemilu 2019 dengan DP4 Pemilu 2024 sebanyak 109.248 atau terjadi penambahan jumlah pemilih sebanyak 6,9%.
- KPU Karawang mengalokasikan 6890 TPS untuk Pemilu Serentak 2024, termasuk diantaranya 4 TPS lokasi Khusus. 4 TPS lokasi khusus tersebut berlokasi di Lapas kelas IIA Karawang, yaitu :

TPS	DPT
901	262
902	261
903	267
904	263

-



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARAWANG

14
Februari
2024

DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILU TAHUN 2024 DI KABUPATEN KARAWANG

PEMILU SARANA
INTEGRASI
BANGSA
14/2
2024

30 KECAMATAN

309 DESA/KEL

6.890 TPS

893.869 LAKI-LAKI

885.338 PEREMPUAN

1.779.207 JUMLAH L+P



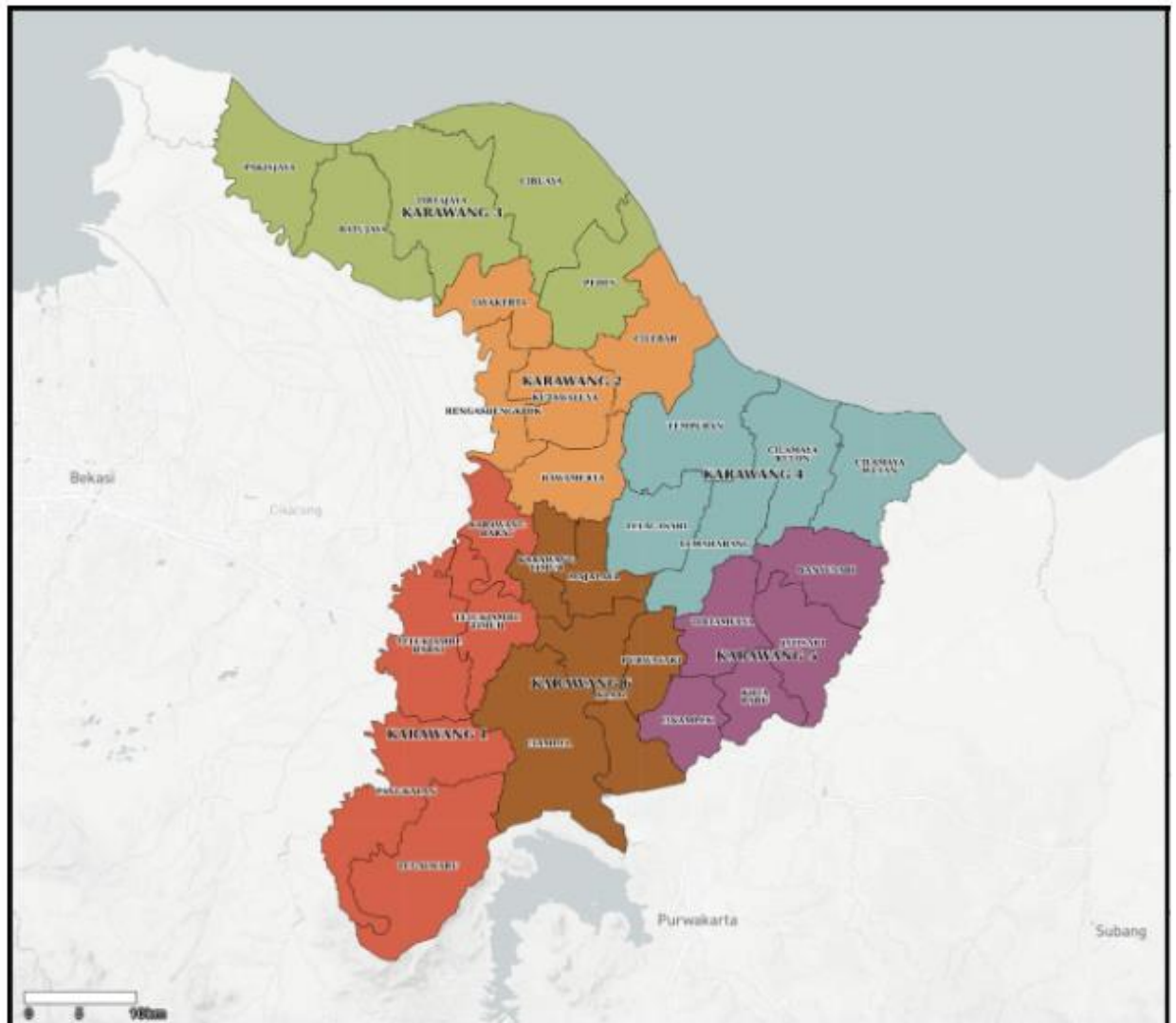
Sumber : Berita Acara KPU Karawang Nomor 266

[kpu-karawang](#) [@kpukabkarawang](#) [@kpu_karawang](#) [kpu karawang](#) <http://kab-karawang.kpu.go.id>

2. Penataan Daerah Pemilihan (Dapil) dan Alokasi Jumlah Kursi untuk DPRD Kabupaten Karawang

Jika merujuk pada Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang Nomor : 40/PL.01.3-BA/3215/2022 tentang Penetapan Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, KPU Kabupaten Karang telah menyelesaikan penataan dapil dan alokasi kursi di Kabupaten Karawang. Dalam penataan dapil tersebut KPU Karawang telah berkoordinasi

dengan berbagai pihak, termasuk melibatkan akademisi dan Bawaslu. Untuk daerah pemilihan (dapil) dalam Pemilu 2024 ada enam dapil. Sementara, alokasi kursi anggota DPRD Karawang untuk Pemilihan Umum 2024 tetap sebanyak 50 kursi.



Gambar 1

Peta Dapil DPRD Kab Karawang

(Sumber: KPU Karawang, 2022)

Berdasarkan Gambar 1, enam dapil seperti halnya Pemilu 2019 lalu, jika dirinci maka **1) Dapil Satu** dengan alokasi sembilan kursi yang meliputi Kecamatan Karawang Barat, Pangkalan, Telukjambe Timur, Telukjambe Barat dan Tegalwaru, serta **2) Dapil Dua** dengan alokasi tujuh kursi (Rengasdengklok, Kutawaluya, Rawamerta, Jayakarta dan Kecamatan Cilebar). Selanjutnya **3) Dapil Tiga** dengan alokasi tujuh kursi (Batujaya, Tirtajaya, Pedes, Cibuaya dan Pakisjaya), **4) Dapil Empat** alokasi tujuh kursi (Cilamaya Wetan, Telagasari, Lemahabang, Tempuran, dan Cilamaya Kulon), **5) Dapil Lima** alokasi sembilan kursi (Cikampek, Jatisari, Tirtamulya, Banyusari dan Kotabaru), serta 6) **Dapil Enam** dengan alokasi 11 kursi (Ciampel, Klari, Majalaya, Karawang Timur, Purwasari).

Sebenarnya, untuk Daerah Pemilihan tidak ada perubahan masih sama dengan Daerah Pemilihan pada Pemilu 2019 lalu, namun untuk alokasi kursi terdapat Perubahan sebagai berikut :

No	Daerah Pemilihan	Jumlah Kursi	
		2019	2024
1	Karawang 1	9	9
2	Karawang 2	7	7
3	Karawang 3	7	7
4	Karawang 4	8	7
5	Karawang 5	9	9
6	Karawang 6	10	11

3. Tahapan Pencalonan Bacaleg DPRD Kabupaten Karawang

Terkait dengan proses pelaksanaan tahapan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan bakal calon Anggota Legislatif (Bacaleg) DPRD Kabupaten Se-Kabupaten Karawang:

- **Tahap Awal** ada 668 (enam ratus enam puluh delapan) Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Karawang yang BMS dari 18 partai Politik.
- **Tahap Perbaikan** ada 130 (seratus tiga puluh) Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Karawang yang TMS dari 18 Partai Politik.
- **Tahap Penceramatan** DCS ada 100 (seratus) Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Karawang yang TMS.

- Semua Partai Politik memenuhi syarat administrasi 100% kecuali:
 1. Partai Kebangkitan Nusantara 28% yang memenuhi syarat dari 46 Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Karawang;
 2. Partai garda Republik Indonesia 11% yang memenuhi syarat dari 18 Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Karawang;
 3. Partai Solidaritas Indonesia 76% dari 41 yang memenuhi syarat Bakal Calalon Anggota DPRD Kabupaten Karawang;
 4. Partai Perindo 54% dari 50 yang memenuhi syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Karawang;
 5. Partai Ummat 61% dari 46 yang memenuhi syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Karawang;



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARAWANG**

**REKAPITULASI DAFTAR CALON SEMENTAR
ANGGOTA DPRD KABUPATEN KARAWANG**
PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024



NO	PARTAI POLITIK	DAPIL	JML CALON	L	P
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	6	50	32	18
2.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	6	50	34	16
3.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	6	50	31	19
4.	PARTAI GOLONGAN KARYA	6	50	32	18
5.	PARTAI NASDEM	6	50	35	15
6.	PARTAI BURUH	6	50	32	18
7.	PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA	6	18	11	7
8.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	6	50	31	19
9.	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	4	13	8	5
10.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	4	23	16	7
11.	PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA	2	2	0	2
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	6	50	33	17
13.	PARTAI BULAN BINTANG	6	50	27	23
14.	PARTAI DEMOKRAT	6	50	33	17
15.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	6	31	18	13
16.	PARTAI PERINDO	6	27	19	18
17.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	6	50	33	17
24.	PARTAI UMMAT	6	28	19	9
JUMLAH :		692	444	258	



 kpu-karawang
  @kpukabkarawang
  @kpu_karawang
  u karawang
  <http://kab-karawang.kpu.go.id>

4. Penyelenggara di Lingkungan KPU Kabupaten Karawang

KPU Kab. Karawang siap menyelenggarakan pemilu 2024. Jumlah Penyelenggara Pemilu 2024 Berjumlah 2,185 personil yang terdiri dari:

- 31 Anggota KPU dan Sekretariat Kabupaten
- 300 PPK dan Sekretariat Kecamatan
- 1854 PPS dan Sekretariat Desa/Kelurahan

5. Anggaran Tahapan Pemilu KPU Kabupaten Karawang

- Tahun 2022 anggaran yang diterima adalah : Rp. 5.221.393.000 (lima milyar dua ratus dua puluh satu juta tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah), dengan alokasi sebagai berikut :

Belanja Gaji	Belanja Rutin + Hibah Non Tahapan	Belanja Tahapan Pemilu 2024
Rp. 2.388.516.000	Rp. 1.160.508.000 Rutin : Rp. 668.008.000 Hibah : Rp. 492.500.000	Rp. 1.672.369.000

- Tahun 2023 s.d Bulan September 2023 Anggaran yang diterima KPU Kabupaten Karawang adalah : Rp. 70.906.391.000 (Tujuh puluh milyar Sembilan ratus enam juta tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Belanja Gaji	Belanja Rutin + Hibah Non Tahapan	Belanja Tahapan Pemilu 2024
Rp. 2.071.669.000	Rp. 1.266.849.000 Rutin : Rp. 766.849.000 Hibah : Rp. 500.000.000	Rp. 67.567.873.000

- Se jauh ini anggaran yang KPU Kab. Karawang terima masih dapat mengakomodir pelaksanaan tahapan yang sedang berjalan, baik di tingkat Kabupaten maupun Badan Adhoc Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- Terkait rencana kebutuhan anggaran tahun 2024, perencanaan dan penyusunan anggaran masih ada di tingkat KPU RI. KPU Kab. Karawang telah dimintai dan mengirimkan data-data yang diperlukan oleh KPU RI terkait kebutuhan pelaksanaan pemungutan suara tahun 2024 melalui KPU Provinsi Jawa Barat seperti Jumlah TPS, DPT dsb.

6. Langkah Koordinasi KPU Kabupaten Karawang

- KPU Kabupaten Karawang telah melaksanakan Koordinasi dengan berbagai instansi terkait pelaksanaan tahapan pemilu 2024, sebagaimana tabel berikut.

Instansi	Bentuk Koordinasi
Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang	<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan Badan Adhoc, Pemda Kab. Karawang telah mengeluarkan SK terkait Sekretariat PPK dan PPS di 30 Kecamatan dan 309 Desa/Kelurahan yang terdiri dari ASN & Non ASN pada masing-masing Kecamatan, Desa/Kelurahan, serta menyediakan fasilitas berupa ruang maupun peralatan untuk operasional PPK/PPS dalam menjalankan tahapan Pemilu 2024. - Pemutakhiran Data Pemilih, Pemda Kab. Karawang melalui disdukcatpil membantu proses pemutakhiran data pemilih, baik itu sanding data maupun percepatan pembuatan KTP bagi yang berusia 17 tahun maupun pencatatan penduduk yang sudah meninggal. - Penyebaran informasi, Pemda Kab. Karawang turut membantu proses penyebaran informasi terkait tahapan pemilihan seperti iklan dan wawancara khusus di radio Sturada. - Hibah operasional, Pemda Kab. Karawang melalui Kesbangpol membantu pengajuan hibah operasional non-pemilihan yang KPU Kab. Gunakan untuk pengecatan Gedung dan perbaikan atap kantor. - Fasilitas, Pemda Kab. Karawang membantu fasilitasi operasional KPU Kab. Karawang diantaranya Gedung dan Kendaraan Operasional.
Kepolisian Resort Karawang	<ul style="list-style-type: none"> - Deklarasi Pemilu Damai, Bersama Polres Karawang KPU menggelar Dekalarasi Pemilu

	Damai 2024 bersama Forkopimda dan Partai Peserta Pemilu 2024.
Kejaksaan Negeri Karawang	- <i>Pendampingan Hukum dan Posko Pemilu 2024</i> , KPU Kab. Karawang dan Kejari Karawang telah melakukan MoU terkait pendampingan proses hukum dalam pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 dan Kejari Karawang juga telah membuka Posko Pemilu 2024 yang menjadi rekan KPU Kab. Karawang dalam bentuk pendistribusian informasi maupun pelayanan kepada pemilih di Kab. Karawang.
BAWASLU Karawang	- <i>Pengawasan Melekat</i> , dalam tiap proses pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 Bawaslu Kab. Karawang selalu hadir mendampingi dan mengawasi proses pelaksanaan tahapan, informasi dan rekomendasi dari Bawaslu membantu KPU dalam menjalankan tahapan dan menetapkan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan tahapan Pemilu yang berjalan

7. Persiapan Tahapan Kampanye

- Kami lakukan komunikasi dan juga sosialisasi terhadap seluruh pesetra pemilu terutama hal-hal yang berkaitan dengan PKPU 15 tentang Kampanye agar seluruh peserta pemilu dapat mematuhi dan mentaati apa yang menjadi keharusan dan larangan peserta pemilu dalam melaksanakan kegiatan kampanye, sehingga proses kampanye dapat berjalan tertib dan aman.
- KPU Kabupaten Karawang bersama dengan forkopimda Kabupaten Karawang dan Parta Peserta Pemilu 2024 di Kabupaten Karawang juga telah berkomitmen dan mendeklarasikan Pemilu Damai Tahun 2024 di Kabupaten Karawang.

8. Kegiatan Sosialisasi Pemilu

- KPU Kabupaten Karawang telah melaksanakan beberapa kegiatan sosialisasi tatap muka baik di lingkup Kabupaten maupun lingkungan Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang dilakukan oleh Badan Adhoc tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- Melakukan sosialisasi jingle pemilu 2024 yang dikemas dengan lomba kreasi senam Jingle Pemilu yang diikuti oleh 30 kecamatan di Kabupaten Karawang.
- Dalam pelaksanaan beberapa kegiatan sosialisasi, KPU Kab. Karawang berkolaborasi dengan organisasi yang ada di Kab. Karawang seperti PWI pada peringatan Hari Pers Nasional. Kolaborasi dengan Pemda dan HIPMI pada acara Gerak Jalan Sehat di Lapangan Karangpawitan yang merupakan rangkaian kegiatan HUT Karawang ke 390 ini yang juga bertepatan dengan Hari Olahraga Nasional 2023 (Haornas) ke 40 Tk Kabupaten Karawang.

9. Logistik Pemilu 2024 di Kabupaten Karawang

- Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 14 Tahun 2023 terutama berkaitan dengan kewenangan Percetakan dan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan pemungutan suara lainnya oleh Sekretariat KPU Kabupaten dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota KPU Kabupaten Karawang mengacu kepada Perpres tentang pengadaan barang/jasa, Petunjuk Teknis serta Surat Edaran dari KPU RI terkait percetakan dan pengadaan perlengkapan Pemungutan Suara lainnya. Adapun yg perlu mendapat perhatian dalam proses tersebut adalah terkait rentang waktu dalam proses pengadaan tersebut, dengan jumlah SDM yg terbatas di KPU kab. Karawang kami perlu menyusun strategi dan membuat tools yang dapat membantu staf KPU Kab. Karawang dalam pengawasan proses dan dapat memitigasi resiko-resiko yang kemungkinan akan dihadapi dalam proses ini.

10. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada 2024

- KPU Kab. Karawang dan Tim TAPD Kab. Karawang masih melakukan pendalaman anggaran kegiatan untuk mencapai efisiensi yang maksimal

tanpa mengganggu jalannya pelaksanaan tahapan Pilkada Karawang Tahun 2024

- Pengajuan Anggaran Pilkada 2024 untuk pertama kali disampaikan pada tanggal 21 November 2021 sebesar Rp. 99.101.646.307, kemudian pada tanggal 19 April 2022 kembali mengajukan anggaran dengan dasar turunya SBML penyelenggaran Pilkada sebesar Rp. 127.340.790.928 (termasuk belanja covid dan tidak ada cost sharing dengan Pemprov Jabar). Singkatnya, Pertanggal 17 Juli 2023, hasil rapat bersama Badan Pengelolaan Keuangan Aset dan Daerah Kabupaten Karawang, KPU Kab. Karawang mengajukan anggaran yang telah di evaluasi dan efisiensi sebesar Rp. 80.671.746.580, dan per tanggal 12 September 2023, Tim BPKAD Pemda Kab. Karawang memberikan nilai anggaran hasil review sebesar Rp. 71.329.355.471.

11. Status Lahan dan Gedung KPU Karawang

- Gedung Kantor KPU Kabupaten Karawang berstatus Pinjam Pakai dari Pemda Kab. Karawang kepada KPU Kabupaten Karawang. Untuk tempat penyimpanan dan pengesetan logistik Pemilu 2024 KPU Kab. Karawang sudah melakukan survei ke beberapa Gudang di sekitar Karawang, dan telah menemukan lokasi dan bangunan yang layak, representatif dan aman dari resiko bencana banjir maupun resiko keamanan lainnya. proses penetapan Gudang untuk Pemilu Tahun 2024 akan dimulai pada minggu ke-3 Bulan September 2023

C. Pemaparan Ketua Bawaslu Kabupaten Karawang Engkus Kusnadi

Ketua Bawaslu Kabupaten Karawang Engkus Kusnadi menyampaikan sejumlah poin-poin berikut ini:

1. Hasil Pengawasan Tahapan Pemilu

-Pendaftaran dan verifikasi partai politik

Pada tahapan ini terdapat 34 orang melakukan aduan kepada Bawaslu Kabupaten Karawang yang merasa namanya dicatut dalam keanggotaan partai politik

-Pendaftaran Calon Perseorangan DPD

Pada tahapan ini, Bawaslu Kabupaten Karawang telah mengirimkan saran perbaikan dan imbauan terkait dengan akses SILON agar dapat diakses secara penuh oleh Bawaslu. Bawaslu memastikan tidak ada jajaran Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan tidak termasuk dalam data pendukung.

-Pemutakhiran Data Pemilih

Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Karawang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Karawang pada tanggal 22 Juni 2023. Pengawasan pemutakhiran data pemilih masih terus berlangsung, yaitu pengawasan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) mulai pada tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan 7 hari menjelang pemungutan suara.

- Pengawasan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Karawang

- Pengawasan langsung pendaftaran pengajuan bakal calon, verifikasi administrasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota
- Bawaslu Kabupaten Karawang tidak dapat mengakses SILON secara penuh
- Bawaslu Karawang telah mengeluarkan surat Imbauan kepada kepala desa dan perangkat desa terkait netralitasnya pada pemilu tahun 2024
- Terdapat kepala desa, Perangkat desa dan PNS yang mencalonkan sebagai anggota DPRD Karawang

2. Penanganan Pelanggaran Pemilu

-Temuan Pelanggaran Administrasi (Nomor Register: 001/REG/TM/KEC/13.19/II/2023)

- Adanya pelanggaran Administrasi terkait adanya anggota pantarlih yang terdaftar dalam data Sipol. Temuan telah terbukti memenuhi unsur-unsur pelanggaran administrasi dan direkomendasikan Ke KPU Kabupaten Karawang untuk ditindaklanjuti. Selain itu pada tahapan ini Bawaslu Karawang juga merekomendasikan ke KPU Karawang terkait adanya proses klarifikasi melalui Video Call yang kemudian dijadikan temuan dan diteruskan ke Bawaslu Provinsi Jawa Barat

untuk dilakukan Sidang Administrasi serta memberikan teguran tertulis dan agar tidak mengulangnya kembali berdasarkan Putusan Sidang Administrasi di Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

-Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik

- **NOMOR REGISTER:** 001/LP/PL/KAB/13.19/I/2023. Status Laporan: Tidak terbukti sebagai pelanggaran kode etik berdasarkan bukti-bukti, keterangan pelapor, terlapor serta saksi.
- **NOMOR REGISTER:** 002/LP/PL/KAB/13.19/VI/2023. Status Laporan: Terbukti memenuhi unsur pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu untuk direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Karawang.

3. Anggaran Bawaslu Karawang

Anggaran yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Karawang pada tahun 2022 dan tahun 2023 seperti tampak pada dua tabel di bawah ini.

Anggaran Tahun 2022

TAHUN	PAGU	REALISASI	SISA
SATKER	3.473.426.000	3.210.716.934	262.709.066
PRA SATKER	1.388.492.000	1.171.505.448	216.986.552
JUMLAH	4.861.918.000	4.382.222.382	479.695.618

Anggaran Tahun 2023

TAHUN	PAGU	REALISASI	SISA
MURNI	17.839.387.000	13.458.266.484	4.281.510.516
TAMBAHAN	6.733.338.000		6.733.338.000
JUMLAH	24.572.725.000	13.458.266.484	11.014.848.516

Pengalokasian belanja rutin/belanja pegawai sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana di Bawaslu Kabupaten Karawang terdiri dari 5 Komisioner, 2 pegawai PNS Organik, 1 pegawai PPPK, dan 1 pegawai PNS DPK serta 12 Pegawai PPNPN. Sementara untuk Tahapan Pemilu di Tahun 2023 belum termasuk pengawasan tahapan kampanye dan pendistribusian logistik, sementara untuk tahun 2024 masih dalam proses penyusunan anggaran.

4. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah

Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang sudah terjalin dengan baik, bentuk dukungannya dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024 diantaranya sudah menjalin kerja sama dalam bentuk Kerja sama tertulis yaitu : Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Karawang dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karawang Tentang Pendidikan Politik dan Demokrasi di Kabupaten Karawang.

5. Rencana Pengawasan Tahapan Kampanye

Bawaslu Kabupaten Karawang melakukan Pengawasan kampanye terdiri dari:

- Mengawasi Materi kampanye;
- Mengawasi tempatnya;
- Mengawasi waktu nya;
- Mengawasi pesertanya, apakah ada orang yang dilarang mengikuti kampanye;
- Mengawasi praktis politik uang;

- Pengawasan pemasangan Alat Peraga Kampanye dan penyebaran Bahan Kampanye

Adapun metode Pengawasannya adalah:

- Pengawasan langsung, Pengawasan yang dilakukan secara langsung pada saat berlangsungnya kegiatan tersebut guna untuk memastikan tahapan kampanye dilaksanakan sesuai ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- Pengawasan tidak langsung, Pengawasan dilakukan dengan cara pencermatan data, Media Sosial, Media Cetak atau Laporan Hasil Pengawasan, apakah terdapat dugaan pelanggaran atau tidak.

Kendala dalam pengawasan:

- Bahwa dalam PKPU Nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye telah diatur, bahwa Petugas kampanye Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten, DPD untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian sesuai tingkatannya dan salinan dokumen pemberitahuan disampaikan ke Bawaslu;
- Bahwa pada faktanya banyak calon Anggota Legislatif yang melakukan kampanye pertemuan tatap muka dengan berkeliling ke kelompok masyarakat tidak membuat surat pemberitahuan ke pihak kepolisian dan ditembuskan kepada Bawaslu, sehingga hal tersebut menjadi tantangan bagi Bawaslu dalam melakukan pengawasan dan penindakan;

6. Indeks Kerawanan Pemilu (IKP)

IKP Kabupaten Karawang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No.	Wilayah	Skor IKP	Tingkat IKP
1	Kabupaten Karawang	46,30	Sedang
2	Sosial Politik	41,34	Sedang
3	Penyelenggaraan Pemilu	47,02	Sedang
4	Kontestasi	69,06	Tinggi
5	Partisipasi	0	Sedang

Jika dilihat pada tabel di atas, maka dimensi yang masuk kategori tinggi yaitu Kontestasi. Dan Bawaslu Kabupaten Karawang untuk meminimalisir keadaan di atas upayanya yaitu dengan melakukan pencegahan dengan menyampaikan surat imbauan kepada KPU Kabupaten Karawang, Pemerintah Daerah Karawang dan kepada partai politik di Kabupaten Karawang terkait upaya pencegahan terhadap dugaan pelanggaran pada Pemilu Tahun 2024.

7. Tim Sentra Gakkumdu

Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Karawang yang terdiri dari Bawaslu Kab. Karawang – Kepolisian Resor Karawang - Kejaksaan Negeri Karawang sampai saat ini sudah sangat Solid secara komunikasi dan koordinasi;

Bahwa anggota Tim terdiri dari:

1. 10 orang dari unsur Bawaslu Kab karawang;
2. 6 orang dari unsur Polres Kab Karawang;

3. 6 orang dari unsur Kejaksanaan kab Karawang.

Bahwa wadah atau sarana Koordinasi Tim dengan dilakukannya Rapat Dalam Kantor Tim anggota Sentra Gakkumdu, dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan sekali, sehingga hal-hal terkait potensi-potensi pelanggaran yang terjadi dalam setiap tahapan dapat dibicarakan dan didiskusikan oleh Tim tersebut, selain dari pertemuan- pertemuan diluar jadwal tersebut juga dilakukan oleh anggota tim Sentra Gakkumdu.

8. Strategi Pengawasan Logistik

POTENSI KERAWANAN DAN FOKUS PENGAWASAN TAHAPAN DISTRIBUSI LOGISTIK	
Potensi Masalah	Fokus Pengawasan
<ul style="list-style-type: none">✓ Jumlah logistik tidak sesuai dengan DPT.✓ Kualitas warna dan gambar surat suara tidak sesuai ketentuan.✓ Kualitas tinta.✓ Waktu distribusi logistik di setiap tingkatan.✓ Jenis alat kelengkapan pumungutan dan penghitungan suara.	<ul style="list-style-type: none">✓ Penyortiran, pengepakan, dan pelipatan surat suara.✓ Distribusi logistik ke tingkat kecamatan, desa, dan TPS (Form C6-KWK dibagikan H-3).✓ Pengamanan proses distribusi logistik.

9. Program Pengawasan Partisipatif

Program pengawasan partisipatif di Baswaslu Karawang selama tahun 2022 sampai tahun 2023 ini sudah berjalan dengan baik, kerja nyata dalam program ini diantaranya berupa kerja sama dengan perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Karawang (unsika, UBP, UBSI, Stkes Horizon, dan Stimik Rosma Karawang), Kerja Sama dengan Pemda Kabupaten Karawang, dan melaksanakan sosialisasi kepada unsur masyarakat, organisasi kepuadaan, mahasiswa dan pelajar yang ada di Kabupaten Karawang.

10. NPHD Pilkada 2024

Sampai saat ini proses hibah pilkada dari pemda Karawang baru pada tahap kesepakatan pagu hibah yang akan diberikan dari usulan Rp.

19.711.380.000, disepakati menjadi Rp. 17.262.450.000 dengan proses penandatanganan berita acara kesepakatan sedang dalam proses. Adapun mengenai NPHD belum bisa ditentukan karena sampai saat ini peraturan KPU tentang tahapan pemilihan kepala daerah tahun 2024 belum ditetapkan sehingga kami belum mengetahui tanggal dimulainya tahapan untuk pilkada

11. Sarana dan Prasarana Kantor Bawaslu

Fasilitas dan Sarana prasarana Kantor di Bawaslu Kabupaten Karawang sudah cukup memadai dan menyesuaikan dengan sumber daya manusia yang ada, sementara gedung kantor yang ditempati saat ini masih menggunakan gedung pinjam pakai dari Pemda yang kondisinya masih terdapat kekurangan ruangan yang dibutuhkan.

IV. CATATAN RAPAT

1. Dalam rangka persiapan menuju Pemilu Serentak 2024, Komisi II DPR RI mengharapkan komitmen dan dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, terhadap sarana-prasarana, fasilitasi sekretariat, dan personalia untuk Badan Adhoc Pemilu 2024, termasuk dukungan anggaran dalam Pilkada Serentak 2024.
2. Terkait jaminan sosial kepada penyelenggara pemilu, Komisi II DPR RI mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang untuk menjalankan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, khususnya bagi penyelenggara pemilu di Kabupaten Karawang pada Pemilu 2024 mendatang.
3. Terkait data pemilih meninggal dunia hasil coklit Pemilu 2024 yang disampaikan KPU Kabupaten Karawang sebanyak 50.963 orang dengan rincian laki-laki 24.192 orang dan perempuan 26.771 orang, Komisi II DPR RI meminta kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang untuk segera meverifikasi data KPU Kabupaten Karawang dan menindaklanjuti dengan menerbitkan Akte Kematian, sehingga ke depan tidak ada lagi nama orang yang sudah meninggal dunia tercatat sebagai pemilih.
4. Komisi II DPR RI meminta kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang untuk memastikan pemilih yang belum memiliki KTP

elektronik (e-KTP) namun telah berusia 17 tahun pada hari pemungutan suara Pemilu 2024 telah dilakukan perekaman data dan penyiapan blangko e-KTP cukup bagi pemilih pemula yang masuk ke daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024—sehingga e-KTP mereka terbit sebelum hari-H—agar mereka nantinya bisa menggunakan hak pilihnya tanpa harus menunjukkan kartu keluarga (KK).

5. Untuk meningkatkan partisipasi pemilih, Komisi II DPR RI meminta KPU Kabupaten Karawang bersama pemerintah daerah untuk melakukan sosialisasi pemilihan umum intensif kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya pemilih pemula ke berbagai sekolah yang ada di Kabupaten Karawang.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 ke Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban. Seluruh masukan maupun permasalahan yang disampaikan akan menjadi catatan Komisi II DPR RI dalam rapat-rapat kerja dengan mitra-mitra kerja. Kepada segenap pihak yang telah membantu terselenggaranya kunjungan kerja ini, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 18 September 2023

Ketua Tim

Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI

Saan Mustopa, M.Si.

A-367

Lampiran:







